

# **RENCANA INDUK PENELITIAN (R I P)**

## **TAHUN 2020-2024**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
LHOKSEUMAWE  
2020**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Bukit Indah Jln. Sumatera No. 8 Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

Telepon 0645-44450 / 085360721950 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.fisip.unimal.ac.id> Email: [fisip@unimal.ac.id](mailto:fisip@unimal.ac.id)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
NOMOR : 792/UN45.2/HK.04/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
TAHUN 2020-2024**

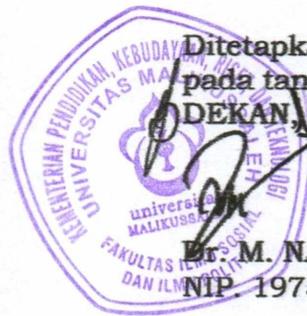
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan pedoman bagi sivitas akademika pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dipandang perlu menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018;
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 628/UN45/KP/2020
- Memperhatikan** : Rencana Induk Penelitian Universitas Malikussaleh dan kebijakan penelitian Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2020-2024.**
- KESATU** : Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tahun 2020-2024.

- KEDUA** : Rencana Induk Penelitian dan Pegabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tahun 2020-2024 lam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bukit Indah  
pada tanggal 11 Mei 2020

DEKAN,

Dr. M. NAZARUDDIN, S.S., M.Si  
NIP. 197305152002121001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
3. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
4. Kepala BAAKPSI Universitas Malikussaleh;
5. Kepala BAUK Universitas Malikussaleh;
6. Arsip.

**TIM PENYUSUN  
RENCANA INDUK PENELITIAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2020-2024**

**PENANGGUNG JAWAB**

Dr. M. Nazaruddin, M.Si

**PENYUSUN:**

Dr. Nirzalin, M.Si (Ketua)  
Iromi Ilham, M.A (Wakil Ketua)  
Anismar, M.Si (Anggota)  
Subhani, M.Si (Anggota)

**DESAIN DAN TATA LETAK**

M. Fathi, S.Kom

**SEKRETARIAT**

Mukhlis, S.Sos

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT Tim penulis telah berhasil menyusun Rencana Induk Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Periode 2020-2024. Rencana Induk Penelitian ini disusun untuk menjadi pedoman bagi sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan pelbagai aktivitas risetnya. Penelitian perlu diarahkan sesuai dengan visi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik agar menjadi kekuatan ilmiah yang sinergis dalam membangun kemajuan Universitas Malikussaleh dan juga berkontribusi nyata dalam mengarahkan dan mengawal kemajuan daerah dan nasional.

Secara praktis, Rencana Induk Penelitian ini disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas Malikussaleh dan juga turunan dari kebijakan penelitian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian proses penyusunan Rencana Induk Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini diucapkan terimakasih. Masukan dan saran untuk penyempurnaan Rencana Induk Penelitian ini di masa mendatang sangat diharapkan.

Lhokseumawe, 14 Mei 2020  
Ketua TIM,

**Dr. Nirzalin, M.Si**  
NIP. 197705142003121001

## SAMBUTAN

Alhamdulillah dengan Ridha Allah SWT, Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024 telah tersusun dengan baik. RIP ini berisi tentang arah dan kebijakan FISIPOL Unimal dalam bidang penelitian. Penelitian Unimal Periode 2020-2024 difokuskan pada delapan bidang yaitu Modal sosial dan kearifan lokal; Konflik dan perdamaian; Model birokrasi dan *e-governance* era revolusi industri 4.0; Kebijakan publik berbasis kearifan lokal; Eksistensi partai politik lokal era perdamaian; Inklusifitas terhadap keragaman budaya; Model komunikasi lintas budaya; Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal. RIP ini juga disusun sesuai dengan visi dan misi serta untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Unimal.

Di samping itu, RIP ini juga disusun sejalan dengan: (1) Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024, (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, (4) Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024, dan (5) Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2016-2020. RIP ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi sivitas akademika FISIPOL Unimal dalam melaksanakan penelitian dan publikasi hasil-hasil penelitian.

Dekan mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RIP yang telah bekerja keras sehingga dokumen ini terselesaikan dengan baik. Terima kasih juga diucapkan kepada para Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi di lingkungan FISIPOL Unimal, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RIP ini.

Lhokseumawe, 15 Mei 2020

Dekan,

**Dr. M. Nazaruddin, SS. M.Si**  
NIP. 197305152002121001

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Peta Jalan Riset.....	2
1.3.Dokumen Penyusunan RIP .....	3
1.4.Maksud dan Tujuan .....	3
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.....	4
2.1 Landasan Pengembangan Penelitian Universitas Universitas Malikussaleh ....	4
2.1.1 Visi UNIMAL.....	4
2.1.2 Misi UNIMAL .....	4
2.1.3 Tujuan .....	4
2.2 Landasan Pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....	4
2.2.1 Visi FISIPOL .....	4
2.2.2 Misi FISIPOL .....	6
2.2.3 Tujuan.....	8
2.2.4 Sasaran.....	10
2.2.5 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	11
2.2.6 Strategi Pencapaian.....	12
2.3 Analisis Kondisi Saat Ini .....	13
2.3.1 Riwayat Perkembangan FISIPOL Unimal .....	13
2.3.2 Capaian yang Telah Diraih .....	15
2.3.3 Potensi yang Dimiliki .....	18
2.3.4 Eksisting Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	19
BAB III GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN DAN TOPIK PENELITIAN FISIPOL Universitas Malikussaleh .....	20
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	20
3.2 Arah Strategi dan Kebijakan.....	20

3.3. Topik Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .....	21
BAB IV SASARAN PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA .....	34
4.1 Sasaran Program Penelitian .....	34
4.2 Program Strategis dan Topik-Topik Riset .....	36
BAB V PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENELITIAN FISIPOL .....	37
BAB VI PENUTUP.....	38

## LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini Juma'at Tanggal 15 Mei 2020 bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. M. Nazaruddin, M.Si  
NIP : 197305152002121001  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirahim menyatakan mengesahkan Rencana Induk Penelitian FISIPOL 20220-2024

Lhokseumawe, 15 Mei 2020

Dr. M. Nazaruddin, M.Si  
197305152002121001

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

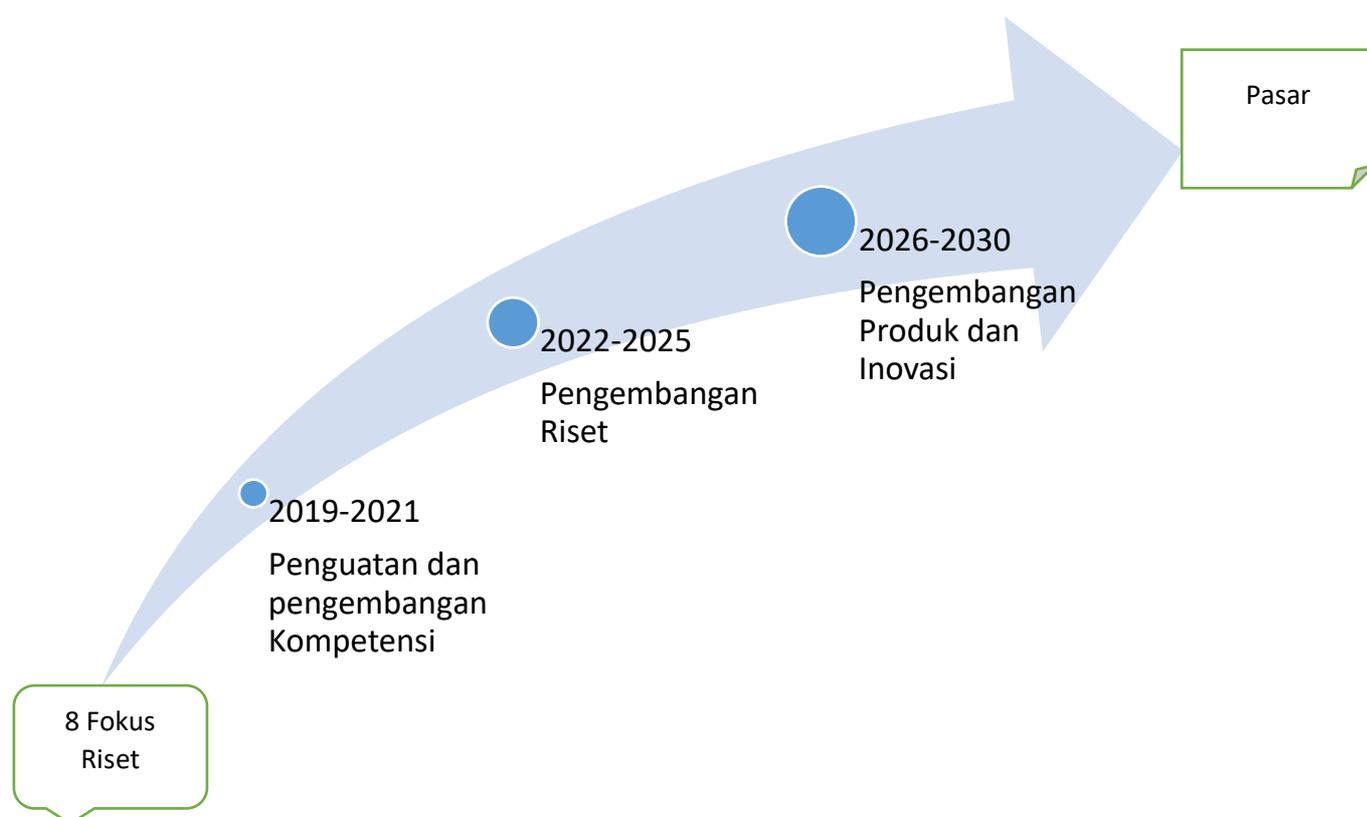
Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh merupakan dokumen yang dijadikan rujukan pengelolaan penelitian dalam waktu lima tahun ke depan, yaitu Tahun 2020 – 2024. RIP disusun berdasarkan hasil evaluasi diri, riset unggulan Fakultas, dan *road map* riset yang direncanakan oleh setiap program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Dokumen RIP ini disusun bertujuan untuk memetakan dan sekaligus menentukan pelbagai tema penelitian unggulan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam jangka waktu lima tahun dengan mengadaptasikan terhadap pelbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai Lembaga akademik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh terus menerus mengupayakan penataan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu akademik, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan arah Statuta Universitas Malikussaleh, pengembangan Tridharma di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diarahkan pada penguatan analitik yang berorientasi pada pemecahan masalah dengan pandangan masa depan, sehingga mampu berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu juga ikut berpartisipasi melalui kerja sama Internasional dalam usaha mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan abadi.

Setelah dilakukan evaluasi diri selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan dan kelemahan berdasarkan kondisi yang ada, termasuk faktor-faktor internal dan eksternal serta memperhatikan capaian penelitian yang telah dilakukan selama ini. Tahap selanjutnya menyusun rencana pengembangan kegiatan penelitian untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Malikussaleh. Dalam penyusunan RIP, tim juga merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran LPPM Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024. Dilanjutkan dengan menyusun rencana strategis pencapaian visi misi tersebut serta merancang bidang fokus riset dalam rangka mencapai visi-misi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Malikussaleh. Selain itu juga ditentukan target sasaran dan *outcome* dari penelitian yang akan dilakukan oleh Universitas Malikussaleh dalam jangka waktu 2020-2024. Setelah disusun rencana pengembangan Penelitian Universitas Malikussaleh,

rancangan rencana tersebut dibahas dalam *focus group discussion* dan lokakarya untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan. Pada tahap akhir, tim menyusun rencana penerapan dan pengukuran kinerja penelitian dengan berbagai indikator yang terukur dan terarah, dalam rangka mencapai visi misi dan IKU Universitas Malikussaleh di Tahun 2020-2024.

## 1.2. Peta Jalan Riset



Gambar 1: Roadmap Rencana Induk Penelitian FISIPOL Unimal Tahun 2019–20230

Peta Jalan Penelitian disusun selama 3 periode, dimana pada periode pertama tahun 2019-2021 yang sudah dipetakan sebelumnya lebih difokuskan pada penguatan dan pengembangan kompetensi. Periode kedua tahun 2022-2025 lebih ditekankan pada pengembangan riset, peta jalan periode ini disusun berdasarkan Renstra FISIPOL Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024. Periode ketiga tahun 2026-2030 ditargetkan sudah mencapai pada tataran pengembangan produk dan inovasi (Gambar 1: Roadmap Rencana Induk Penelitian FISIPOL Unimal Tahun 2016–20229). Topik-topik riset yang disusun pada RIP ini adalah topik-topik yang diharapkan dapat terlaksana pada periode 2020–2024 yang dikelompokkan ke dalam delapan (8) fokus riset

yaitu: (1) Konflik dan Perdamaian, (2) Globalisasi dan disrupsi sosial, (3) Collaborative Governance, (4) Kebijakan publik berbasis kearifan lokal (5) Pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, (6) Partai Politik Lokal dan Masa Depan Perdamaian, (7) Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan tata kelola pariwisata, (8) Model komunikasi damai pada masyarakat pasca konflik.

### **1.3. Dokumen Penyusunan RIP**

RIP ini disusun dengan berpedoman kepada dokumen yang berhubungan dengan penelitian yaitu: (1) Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024, (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan Tahun 2020-2024, (4) Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh merupakan rencana penelitian yang disusun untuk periode 2020-2024. RIP Unimal ini disusun berdasarkan visi, misi Unimal dan rencana strategis Unimal 2020-2024. Tujuan RIP FISIPOL Unimal disusun adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian di FISIPOL Universitas Malikussaleh guna mensinergikan rencana pembangunan nasional, rencana pengembangan Unimal, rencana pengembangan FISIPOL dengan pengembangan daerah berbasis potensi lokal;
- 2) Meningkatkan daya saing dan kompetensi civitas akademika FISIPOL Universitas Malikussaleh dalam bidang penelitian;
- 3) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan riset kolaborasi dosen FISIPOL Universitas Malikussaleh di tingkat regional, nasional dan internasional;
- 4) Meningkatkan mutu pengelolaan penelitian di FISIPOL Universitas Malikussaleh

**BAB II**  
**LANDASAN PENGEMBANGAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

RIP disusun sebagai pedoman pengembangan penelitian di FISIPOL Universitas Malikussaleh. RIP ini diturunkan dari Rencana Strategis Universitas Malikussaleh dan juga Prioritas Riset Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

**2.1. Landasan Pengembangan Penelitian Universitas Malikussaleh**

**2.1.1. Visi Universitas Malikussaleh**

Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal.

**2.1.2. Misi Universitas Malikussaleh**

- 1) Menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang ada di dalam masyarakat;
- 2) Mengembangkan aktivitas penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial politik, hukum, kesehatan, dan lingkungan hidup yang mampu bersaing di tingkat internasional;
- 3) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik, dan;
- 4) Meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, transparansi, dan otonomi dalam rangka terwujudnya perguruan tinggi yang baik serta mendukung reformasi birokrasi.

### **2.1.3. Tujuan**

- 1) Menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, berakhlak mulia, mandiri, cerdas, dan religius serta mampu bersaing dan berkembang secara profesional.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial politik, hukum, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- 3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial politik, hukum, kesehatan, dan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
- 4) Menghasilkan kinerja perguruan tinggi yang efektif, efisien, dan berintegritas untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkelanjutan

## **2.2. Landasan Pengembangan Penelitian FISIPOL Universitas Malikussaleh**

### **2.2.1 Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sebagai salah satu lembaga pendidikan perguruan tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memajukan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul khususnya dalam bidang keilmuan sosial dan politik.

Memasuki era disrupsi akibat lahirnya Revolusi Industri 4.0 di mana kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat cepat meniscayakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh menyikapi dengan serius agar tidak tertinggal dalam dinamika dunia pendidikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mempunyai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan

melakukan pengembangan dan inovasi dalam bidang keilmuan sosial dan politik serta menyikapi perkembangan-perkembangan aktual yang cepat dan bahkan disruptif.

Visi yang disusun oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024 mengikuti Visi dari Universitas Malikussaleh. Adapun Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”.**

Makna visi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unggul

Kemampuan melaksanakan pendidikan tinggi yang bermutu sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Menghasilkan keilmuan sosial politik yang bermutu dan implementatif untuk mendukung perubahan dan kemajuan masyarakat. Sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh memiliki keahlian dalam melaksanakan kegiatan penelitian, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sosial politik sesuai dengan bidangnya. Sivitas akademika dan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berpengetahuan tinggi dan memiliki *sense of art* yang mampu bersaing dan kompetitif dalam mewujudkan eksistensinya. Transformasi keilmuan sosial politik merupakan jawaban dari tuntutan era globalisasi dan sekaligus era disrupsi akibat perkembangan Revolusi Industri 4.0. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat menjadikan pelbagai potensi lokal sebagai sumber pengembangan karya ilmiah yang inovatif dan kompetitif. Pelbagai program/kegiatan dirancang untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul, mulai dari kegiatan kemahasiswaan, dosen, peneliti, pengembangan riset dan inovasi berbasis potensi lokal. Seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan tulang punggung dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional. Sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan lulusannya mampu berkontribusi pada masyarakat melalui proses pendiseminasian ilmu

pengetahuan (pendidikan), penemuan pengetahuan baru (hasil invensi dan inovasi melalui proses penelitian), dan penerapan ilmu pengetahuan untuk mendorong terjadinya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat (pengabdian pada masyarakat).

Keunggulan di bidang penemuan berbasis ilmu pengetahuan sosial dan politik yang berlandaskan potensi lokal ditentukan oleh besarnya kontribusi produk sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang berkualitas sehingga mampu mendorong terjadinya pengembangan keilmuan dan penerapannya di masyarakat. Karya ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari hasil risetnya mampu menjadi karya kebaruan dalam skala keilmuan sosial dan politik baik dari segi teoritis, konseptual, maupun implementasinya sehingga memberi kontribusi pengayaan keilmuan dan inovasi kebijakan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dalam proses pengembangan kualitas karya keilmuan sosial dan politik, Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik harus mampu memberi sumbangan terhadap kualitas kebijakan pemangku kebijakan menjadi lebih baik, efisiensi, dan implementatif dengan merujuk pada hasil riset yang dilakukan secara cermat dan berkelanjutan. Kontribusi Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada pemangku kebijakan juga dapat berupa *technical assistance* untuk pengembangan program, konsep, dan model kebijakan yang bersifat pemecahan masalah (*problem solving*). Dalam konteks ini fenomena partai lokal, konflik dan resolusi damai, pelbagai bentuk kearifan lokal yang multikultural, tata kelola pemerintahan pasca konflik, otonomi khusus dan penerapan syari'at Islam layak menjadi kajian strategis bagi Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangannya. Menghasilkan jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan, jumlah publikasi nasional dan internasional, jumlah karya inovasi model kebijakan dari hasil penelitian dan pengembangan (*research and development/R & D*), jumlah sitasi karya ilmiah dan jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat serta jumlah produk inovasi dengan sasaran menguatnya kapasitas inovasi yang dihasilkan oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

#### b. Di Tingkat Internasional

- 1) Mengadopsi standar-standar nasional dan internasional dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

- 2) Menjadi lembaga pendidikan yang menjalankan praktik-praktik terbaik pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi tingkat internasional.
- 3) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan politik yang diakui oleh komunitas internasional.
- 4) Mempunyai lulusan yang mempunyai kompetensi dan daya saing global.
- 5) Menjalin kerjasama dan membangun jejaring dengan perguruan tinggi asing.
- 6) Dikenal di dunia internasional.

#### c. Berbasis Potensi Lokal

Potensi lokal adalah kekayaan alam, falsafah, nilai, norma, sosial, budaya, model tindakan terbaik (kearifan lokal), dan sumberdaya manusia pada suatu daerah. Mencapai keunggulan di tingkat internasional berbasis potensi lokal meliputi potensi keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya sosial-budaya, tata-nilai, model tindakan terbaik (kearifan lokal/*best practice*) melalui pelbagai hasil riset keilmuan sosial dan politik, publikasi, dan karya inovasi keilmuan sosial dan politik.

#### **2.2.2 Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Malikussaleh, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyusun misi yang mengacu kepada Misi Universitas Malikussaleh. Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sesuai dengan tridharma perguruan tinggi dan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat secara luas. Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan keilmuan sosial dan politik unggul, religius, transformatif, dan progresif berbasis pada potensi lokal dan berstandar internasional;
2. Mengembangkan penelitian dan inovasi unggul dalam keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal yang kompetitif di tingkat internasional;

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan pelayanan administrasi berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;
5. Meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, dan transparansi untuk mewujudkan tata kelola lembaga unggul, efektif, dan efisien;
6. Menjalinkan hubungan sinergis dengan pelbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam mengembangkan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.

### **Perwujudan Misi**

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mengutamakan integrasi dan sinergisme pelbagai komponen dalam perwujudannya. Adapun perwujudan misi ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang unggul, transformatif, dan progresif berbasis pada potensi lokal dan berstandar internasional berlandaskan semangat religius dan akhlak mulia untuk berkontribusi bagi kemanfaatan kehidupan masyarakat.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu sosial dan ilmu politik berupa keunggulan karya inovasi berbasis riset yang berkualitas dan bersama para pemangku kepentingan memperkaya dan menyebarkannya untuk menyelesaikan permasalahan bangsa di bidang sosial dan politik.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia yang unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan pelayanan administrasi berbasis potensi lokal dan berstandar internasional melalui pelbagai pelatihan, seminar, konferensi, pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, kuliah dosen tamu dan riset bersama.

5. Menerapkan tata kelola lembaga unggul, efektif, dan efisien dengan mengacu pada landasan kapabilitas, akuntabilitas dan transparansi
6. Menerapkan ilmu pengetahuan bidang ilmu sosial dan ilmu politik untuk melayani kebutuhan masyarakat, industri dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bangsa secara berkelanjutan.

### **Asas Misi**

Asas dari Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh adalah religius, ilmu, potensi lokal, internasional, dan organisasi. Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Religius adalah sikap dan tindakan sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai luhur agama (agama Islam) sehingga selalu mengedepankan akhlak yang mulia. Nilai-nilai etis sudah ada sejak dalam pikiran hingga dengan tindakan. Maka sosok sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik senantiasa bercirikan figur yang beriman, fatanah (cerdas), amanah (dapat dipercaya), siddiq (Jujur) dan tabliq (adil, selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, toleran, dan memiliki empati sosial yang tinggi terhadap sesama.
2. Ilmu adalah sikap dan tindakan sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu bertindak berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Mengedepankan nilai-nilai akademis dalam pelbagai dialektika yang dilakukan baik dengan komunitas akademis maupun dengan publik. Senantiasa menciptakan dan melahirkan inovasi-inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
3. Internasional  
Mengembangkan pendidikan, pembelajaran dan riset bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berbasis potensi lokal yang memiliki keunggulan di tingkat Internasional
4. Potensi Lokal

Potensi lokal adalah kekayaan alam, falsafah, nilai, norma, sosial, budaya, model tindakan terbaik (kearifan lokal), dan sumberdaya manusia pada suatu daerah. Sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menggali dan mengembangkan potensi lokal sebagai inti dari kerja akademis dalam rangka memberi kontribusi bagi terciptanya kemajuan masyarakat dan keunggulan bangsa.

### **2.2.3 Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, relijius, transformatif, progresif dan kompetitif di tingkat internasional dalam keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
2. Menghasilkan karya ilmiah unggul dalam keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal dan menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan sosial dan politik di tingkat internasional;
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
4. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan pelayanan administrasi berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;
5. Menghasilkan kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang unggul, efektif, efisien, dan berintegritas;
6. Menghasilkan ekosistem dan atmosfer akademik yang ramah, produktif, kreatif, inovatif, dan interkonektif di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mendukung pengembangan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.

### **2.2.4 Sasaran**

1. Meningkatnya mutu pendidikan dan pembelajaran yang unggul berstandar internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;

2. Meningkatnya kuantitas, mutu, dan pengembangan riset unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
3. Meningkatnya karya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
4. Meningkatnya sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan pelayanan administrasi berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;
5. Terwujudnya kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang unggul, efektif, efisien, dan berintegritas;
6. Meningkatnya hubungan sinergis di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.

### 2.2.5 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.  
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<b>VISI</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unggul di Tingkat Internasional	Menyelenggarakan layanan pendidikan keilmuan sosial dan politik yang unggul, relijius, transformatif, dan progresif berbasis	Menghasilkan lulusan yang unggul, relijius, transformatif, progresif dan kompetitif di tingkat internasional dalam keilmuan sosial	Meningkatnya mutu pendidikan dan pembelajaran yang unggul berstandar internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik

Berbasis Potensi Lokal	pada potensi lokal dan berstandar internasional;	dan politik berbasis potensi lokal;	berbasis potensi lokal;
	Mengembangkan penelitian dan inovasi yang unggul dalam keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal yang kompetitif di tingkat internasional;	Menghasilkan karya ilmiah unggul dalam keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal dan menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan sosial dan politik di tingkat internasional;	Meningkatnya kuantitas, mutu, dan pengembangan riset unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
	Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;	Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;	Meningkatnya karya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;
Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumberdaya manusia yang unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan pelayanan administrasi	Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan	Meningkatnya sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi unggul dalam bidang keilmuan sosial dan	

	berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;	pelayanan administrasi berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;	politik dan pelayanan administrasi berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;
	Meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, dan transparansi untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang unggul, efektif, dan efisien;	Menghasilkan kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang unggul, efektif, efisien, dan berintegritas;	Terwujudnya kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang unggul, efektif, efisien, dan berintegritas;
	Menjalin hubungan sinergis dengan pelbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam mengembangkan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.	Menghasilkan ekosistem dan atmosfer akademik yang ramah, produktif, kreatif, inovatif, dan interkonektif di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mendukung pengembangan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.	Meningkatnya hubungan sinergis di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.

### 2.2.6 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan keunggulan keilmuan sosial dan politik pada taraf internasional.
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia serta daya dukung sarana dan prasarana secara berkelanjutan dalam menunjang aktifitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Peningkatan standar kualitas dosen dan staf administrasi yang memiliki komitmen, etika, integritas, dan akuntabilitas.
4. Peningkatan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan, moral, dan keterampilan yang dapat ditunjukkan dan ditampilkan di depan pengguna (*user*).
5. Peningkatan kuantitas dosen sesuai kebutuhan profesionalitas keilmuan melalui rekrutmen dosen tetap PNS atau non PNS yang kompetitif dan transparan.
6. Peningkatan kapasitas organisasi dan kelembagaan yang sinergis dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Peningkatan kepercayaan (*social trust*) dan jaringan kerja (*networking*) untuk mendukung pengembangan kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara berkelanjutan (*sustainable improvement*).

### **Tahapan Strategi Pencapaian**

Proses pencapaian VMTS dilakukan secara dialektis melalui tahapan sebagai berikut:

#### **a. Tahapan 2020-2021: Masa Konsolidasi Internal.**

Tahap ini difokuskan kepada konsolidasi antar dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sumber daya untuk memahami visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Indikator utama pada tahap ini ditekankan pada terbangunnya kesamaan persepsi dan komunikasi akademik yang intens antar civitas akademika FISIPOL dengan Universitas untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran serta berjalannya sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, dan penjaminan mutu lulusan serta sarana dan prasarana secara internal institusi.

### b. Tahapan 2022-2028: Masa Pengembangan.

Pada masa ini akan difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia. Dosen didorong untuk melakukan publikasi ilmiah nasional dan internasional agar mampu mencapai derajat Guru Besar dan melahirkan pelbagai inovasi dalam mendukung kemajuan bangsa. Kemudian tenaga kependidikan juga ditingkatkan kinerja dan kemampuannya. Pada saat yang sama kurikulum terus dipertajam dan diperbaiki yang tetap berbasis pada potensi lokal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah memiliki lulusan atau alumni yang mampu menjadi *agen of change* dalam masyarakat.

### c. Tahapan 2029-2035: Masa Keunggulan.

Setelah tata pamong, kepemimpinan, sarana dan prasana, sumber daya manusia, kurikulum, dan alumni telah mampu dikembangkan, maka pada tahap selanjutnya adalah masa keunggulan di tingkat internasional berbasis potensi lokal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh menjadi centre of excellent dalam kajian-kajian keilmuan sosial berbasis potensi lokal seperti Modal sosial dan kearifan lokal; Konflik dan perdamaian; Model birokrasi dan *e-governance* era revolusi industri 4.0; Kebijakan publik berbasis kearifan lokal; Eksistensi partai politik lokal era perdamaian; Inklusifitas terhadap keragaman budaya; Model komunikasi lintas budaya; Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal;

### 3.3. Topik Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No	Kompetensi/ Keahlian/ Keilmuan	Isu-isu Strategis	Konsep Pemikiran	Pemecahan Masalah	Topik Riset yang Diperlukan
1.	Magister Sosiologi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radikalisme dan terorisme.</li><li>2. Revolusi industri 4.0. globalisasi dan disrupsi.</li><li>3. Gerakan sosial dan tatanan sosial baru.</li><li>4. Modal sosial dan kearifan lokal.</li><li>5. Pemberdayaan masyarakat dan hubungan industrial.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembeneran dan generalisasi ideologi personal maupun kelompok.</li><li>2. Perubahan tata nilai dan norma hubungan sosial.</li><li>3. Tekanan massa dan perubahan tatanan sosial.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sikap moderat terhadap keragaman ideologi personal dan kelompok.</li><li>2. Eksistensi tata nilai dan norma hubungan sosial baru.</li><li>3. Tatanan sosial baru pasca gerakan sosial.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Radikalisme dan terorisme berbasis ideologi.</li><li>2. Revolusi industri 4.0, globalisasi dan disrupsi sosial.</li><li>3. Gerakan sosial dan perubahan tatanan sosial.</li><li>4. Modal sosial dan kearifan lokal</li><li>5. Pemberdayaan masyarakat dan hubungan industrial.</li></ol>

		<p>6. Pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan ekologis.</p> <p>7. Pembangunan dan kemiskinan.</p> <p>8. Konflik dan perdamaian.</p> <p>9. Kesetaraan gender.</p> <p>10. Bencana dan perubahan sosial.</p> <p>11. Kontestasi dominasi paham keagamaan.</p> <p>12. Kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.</p> <p>13. Perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) dan imigran gelap.</p> <p>14. Marginalisasi masyarakat dalam formulasi kebijakan sosial.</p> <p>15. Marginalisasi peran agama dalam pembangunan.</p> <p>16. Alienasi tenaga kerja lokal dalam industri.</p> <p>17. Tergerusnya bahasa lokal dalam relasi sosial.</p> <p>18. Rentannya keamanan masyarakat sipil dalam konflik.</p> <p>19. Terancamnya hak-hak sipil dalam ruang demokrasi.</p>	<p>4. Nilai dan norma yang melandasi integrasi sosial.</p> <p>5. Marginalisasi masyarakat dari industrialisasi.</p> <p>6. Harmonisasi pembangunan dan lingkungan sosial serta alam.</p> <p>7. Pembangunan dan keterputusan akses masyarakat pada sumber daya ekonomi.</p> <p>8. Benturan sosial dan resolusi konflik.</p> <p>9. Diskriminasi gender dan kesamaan akses sektor publik.</p> <p>10. Hubungan sosial baru pasca bencana.</p> <p>11. Benturan paham keagamaan.</p> <p>12. Peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.</p> <p>13. Konflik, imigran gelap dan perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>).</p> <p>14. Signifikansi keterlibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan sosial.</p> <p>15. Urgensi nilai-nilai keagamaan dalam implementasi program pembangunan.</p>	<p>4. Pengarus utamaan (<i>mainstream</i>) modal sosial dan kearifan lokal dalam pembangunan.</p> <p>5. Penguatan akses masyarakat terhadap industri.</p> <p>6. Hubungan produktif lingkungan sosial, alam dan program pembangunan.</p> <p>7. Penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dalam setiap program pembangunan.</p> <p>8. Harmonisasi hubungan sosial dan penguatan perdamaian.</p> <p>9. Kesetaraan gender pada sektor publik</p> <p>10. Model mitigasi bencana dan tatanan sosial baru berbasis kearifan lokal.</p> <p>11. Harmonisasi dan kebebasan ruang eksistensi terhadap pluralisme paham keagamaan.</p> <p>12. Peningkatan produksi dan pemberdayaan ekonomi petani.</p> <p>13. Perdamaian dan penguatan mitigasi terhadap</p>	<p>6. Pembangunan berkelanjutan dan dan keseimbangan ekologi sosial dan alam.</p> <p>7. Pembangunan dan problema kemiskinan.</p> <p>8. Konflik, resolusi konflik dan perdamaian.</p> <p>9. Pengarus utamaan gender dalam pembangunan dan sektor publik.</p> <p>10. Mitigasi bencana dan tatanan sosial baru.</p> <p>11. Perebutan dominasi wacana paham keagamaan dalam ranah publik.</p> <p>12. Kedaulatan pangan, peningkatan produksi dan pemberdayaan ekonomi petani.</p> <p>13. Penguatan perdamaian dan mitigasi perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>).</p> <p>14. Formulasi kebijakan sosial dan partisipasi publik.</p> <p>15. Eksistensi agama dalam pembangunan.</p> <p>16. Tenaga kerja lokal dan industri.</p> <p>17. Bahasa lokal sebagai identitas sosial dan budaya.</p> <p>18. Masyarakat Sipil dan Keamanan.</p> <p>19. Hak-Hak Sipil dan Demokrasi.</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>16. Pengutamaan tenaga kerja lokal dalam operasionalisasi industri.</p> <p>17. Ko eksistensi bahasa lokal sebagai <i>lingua franca</i></p> <p>18. Terjaminnya keamanan masyarakat sipil dalam konflik.</p> <p>19. Masyarakat sipil memiliki kebebasan dalam menyalurkan haknya diruang demokrasi.</p>	<p>perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>).</p> <p>14. Keterlibatan partisipasi publik dalam formulasi kebijakan sosial.</p> <p>15. Integrasi nilai-nilai keagamaan dalam implementasi program pembangunan.</p> <p>16. Penerimaan tenaga kerja lokal dalam industri.</p> <p>17. Penguatan bahasa lokal sebagai identitas sosial dan budaya etnis.</p> <p>18. Keamanan masyarakat sipil sebagai prioritas dalam konflik.</p> <p>19. Kebebasan ekspresi hak-hak sipil dalam ruang demokrasi.</p>	
2.	Magister Administrasi Publik	<p>1. Signifikansi proses formulasi kebijakan integratif.</p> <p>2. Reformasi sektor publik dan transformasi digital.</p> <p>3. Transparansi layanan publik.</p> <p>4. Integritas dan loyalitas aparatur publik.</p> <p>5. Disrupsi pola pelayanan publik.</p> <p>6. Kesenjangan kebijakan publik dan kearifan lokal.</p>	<p>1. Integrasi pemerintah dan masyarakat dalam perumusan kebijakan.</p> <p>2. Reformasi birokrasi dan <i>governance</i> digital era revolusi industri 4.0.</p> <p>3. Signifikansi pelayanan prima.</p> <p>4. Profesionalisme dan loyalitas aparatur publik dalam penciptaan pemerintahan yang baik.</p> <p>5. Model pelayanan inovatif.</p>	<p>1. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam perumusan kebijakan.</p> <p>2. Efisiensi birokrasi dan efektivitas <i>governance</i> berbasis digital.</p> <p>3. Layanan publik sepenuh hati (<i>excellent service</i>).</p> <p>4. Standar pelayanan publik.</p> <p>5. Inovasi dan kualitas pelayanan publik.</p> <p>6. Harmonisasi kebijakan publik dan kearifan lokal.</p>	<p>1. Formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.</p> <p>2. Model birokrasi dan <i>e-governance</i> era revolusi industri 4.0.</p> <p>3. Model pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan sepenuh hati (<i>excellent service</i>).</p> <p>4. Integritas, loyalitas, kinerja dan profesionalisme aparatur publik dalam pelaksanaan standar pelayanan publik.</p> <p>5. Pelayanan publik berbasis digital</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Disintegrasi <i>governance</i> dan rendahnya keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam pemerintahan.</li> <li>8. Pembangunan dan marginalisasi masyarakat.</li> <li>9. Eksistensi lembaga pemerintahan lokal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Signifikansi integrasi kebijakan publik dan kearifan lokal.</li> <li>7. Integritas <i>governance</i> dan sinergisitas <i>stakeholders</i> dalam pemerintahan.</li> <li>8. Pembangunan dan perubahan masyarakat menjadi lebih sejahtera.</li> <li>9. Signifikansi kelembagaan pemerintahan lokal dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. <i>Collaborative governance</i> dan sinergisitas <i>stakeholders</i> dalam pemerintahan.</li> <li>8. Kesejahteraan masyarakat sebagai fokus pembangunan.</li> <li>9. Penguatan kapasitas lembaga pemerintahan lokal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Kebijakan publik berbasis kearifan lokal.</li> <li>7. <i>Collaborative governance (triple helix, quadruple helix)</i>.</li> <li>8. Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial-ekonomi.</li> <li>9. Model lembaga pemerintahan lokal.</li> </ul>
3.	Sosiologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Radikalisme dan terorisme.</li> <li>2. Revolusi industri 4.0, globalisasi dan disrupsi.</li> <li>3. Gerakan sosial dan tatanan sosial baru.</li> <li>4. Modal sosial dan kearifan lokal.</li> <li>5. Pemberdayaan masyarakat dan hubungan industrial.</li> <li>6. Pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan ekologis.</li> <li>7. Pembangunan dan kemiskinan.</li> <li>8. Konflik dan perdamaian.</li> <li>9. Kesetaraan gender.</li> <li>10. Bencana dan perubahan sosial.</li> <li>11. Kontestasi dominasi paham keagamaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembenaan dan generalisasi ideologi personal maupun kelompok.</li> <li>2. Perubahan tata nilai dan norma hubungan sosial.</li> <li>3. Tekanan massa dan perubahan tatanan sosial.</li> <li>4. Nilai dan norma yang melandasi integrasi sosial.</li> <li>5. Marginalisasi masyarakat dari industrialisasi.</li> <li>6. Harmonisasi pembangunan dan lingkungan sosial serta alam.</li> <li>7. Pembangunan dan keterputusan akses masyarakat pada sumber daya ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap moderat terhadap keragaman ideologi personal dan kelompok.</li> <li>2. Eksistensi tata nilai dan norma hubungan sosial baru.</li> <li>3. Tatanan sosial baru pasca gerakan sosial.</li> <li>4. Pengarus utamaan (<i>mainstream</i>) modal sosial dan kearifan lokal dalam pembangunan.</li> <li>5. Penguatan akses masyarakat terhadap industri.</li> <li>6. Hubungan produktif lingkungan sosial, alam dan program pembangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Radikalisme dan terorisme berbasis ideologi.</li> <li>2. Revolusi industri 4.0, globalisasi dan disrupsi sosial.</li> <li>3. Gerakan sosial dan perubahan tatanan sosial.</li> <li>4. Modal sosial dan kearifan lokal</li> <li>5. Pemberdayaan masyarakat dan hubungan industrial.</li> <li>6. Pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan ekologi sosial dan alam.</li> <li>7. Pembangunan dan problema kemiskinan.</li> <li>8. Konflik, resolusi konflik dan perdamaian.</li> <li>9. Pengarus utamaan gender dalam pembangunan dan sektor publik.</li> <li>10. Mitigasi bencana dan tatanan sosial baru.</li> </ul>

	<p>12. Kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.</p> <p>13. Perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) dan imigran gelap.</p> <p>14. Marginalisasi masyarakat dalam formulasi kebijakan sosial.</p> <p>15. Marginalisasi peran agama dalam pembangunan.</p> <p>16. Alienasi tenaga kerja lokal dalam industri.</p> <p>17. Tergerusnya bahasa lokal dalam relasi sosial.</p> <p>18. Rentannya keamanan masyarakat sipil dalam konflik.</p> <p>19. Terancamnya hak-hak sipil dalam ruang demokrasi.</p>	<p>8. Benturan sosial dan resolusi konflik.</p> <p>9. Diskriminasi gender dan kesamaan akses sektor publik.</p> <p>10. Hubungan sosial baru pasca bencana.</p> <p>11. Benturan paham keagamaan.</p> <p>12. Peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.</p> <p>13. Konflik, imigran gelap dan perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>).</p> <p>14. Signifikansi keterlibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan sosial.</p> <p>15. Urgensi nilai-nilai keagamaan dalam implementasi program pembangunan.</p> <p>16. Pengutamaan tenaga kerja lokal dalam operasionalisasi industri.</p> <p>17. Ko eksistensi bahasa lokal sebagai <i>lingua franca</i></p> <p>18. Terjaminnya keamanan masyarakat sipil dalam konflik.</p> <p>19. Masyarakat sipil memiliki kebebasan dalam menyalurkan haknya diruang demokrasi.</p>	<p>7. Penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dalam setiap program pembangunan.</p> <p>8. Harmonisasi hubungan sosial dan penguatan perdamaian.</p> <p>9. Kesetaraan gender pada sektor publik</p> <p>10. Model mitigasi bencana dan tatanan sosial baru berbasis kearifan lokal.</p> <p>11. Harmonisasi dan kebebasan ruang eksistensi terhadap pluralisme paham keagamaan.</p> <p>12. Peningkatan produksi dan pemberdayaan ekonomi petani.</p> <p>13. Perdamaian dan penguatan mitigasi terhadap perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>).</p> <p>14. Keterlibatan partisipasi publik dalam formulasi kebijakan sosial.</p> <p>15. Integrasi nilai-nilai keagamaan dalam implementasi program pembangunan.</p> <p>16. Penerimaan tenaga kerja lokal dalam industri.</p>	<p>11. Perebutan dominasi wacana paham keagamaan dalam ranah publik.</p> <p>12. Kedaulatan pangan, peningkatan produksi dan pemberdayaan ekonomi petani.</p> <p>13. Penguatan perdamaian dan mitigasi perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>).</p> <p>14. Formulasi kebijakan sosial dan partisipasi publik.</p> <p>15. Eksistensi agama dalam pembangunan.</p> <p>16. Tenaga kerja lokal dan industri.</p> <p>17. Bahasa lokal sebagai identitas sosial dan budaya.</p> <p>18. Masyarakat Sipil dan Keamanan.</p> <p>19. Hak-Hak Sipil dan Demokrasi.</p>
--	---	---	--	---

				<p>17. Penguatan bahasa lokal sebagai identitas sosial dan budaya etnis.</p> <p>18. Keamanan masyarakat sipil sebagai prioritas dalam konflik.</p> <p>19. Kebebasan ekspresi hak-hak sipil dalam ruang demokrasi.</p>	
4.	Administrasi Publik	<p>1. Signifikansi proses formulasi kebijakan integratif.</p> <p>2. Reformasi sektor publik dan transformasi digital.</p> <p>3. Transparansi layanan publik.</p> <p>4. Integritas dan loyalitas aparatur publik.</p> <p>5. Disrupsi pola pelayanan publik.</p> <p>6. Kesenjangan kebijakan publik dan kearifan lokal.</p> <p>7. Disintegrasi <i>governance</i> dan rendahnya keterlibatan <i>stakeholders</i> dalam pemerintahan.</p> <p>8. Pembangunan dan marginalisasi masyarakat.</p> <p>9. Eksistensi lembaga pemerintahan lokal.</p> <p>10. Kepemimpinan yang tidak sinergis antara masyarakat dan pemerintah lokal.</p>	<p>1. Integrasi pemerintah dan masyarakat dalam perumusan kebijakan.</p> <p>2. Reformasi birokrasi dan <i>governance</i> digital era revolusi industri 4.0.</p> <p>3. Signifikansi pelayanan prima.</p> <p>4. Profesionalisme dan loyalitas aparatur publik dalam penciptaan pemerintahan yang baik.</p> <p>5. Model pelayanan inovatif.</p> <p>6. Signifikansi integrasi kebijakan publik dan kearifan lokal.</p> <p>7. Integrasikan <i>governance</i> dan sinergisitas <i>stakeholders</i> dalam pemerintahan.</p> <p>8. Pembangunan dan perubahan masyarakat menjadi lebih sejahtera.</p> <p>9. Signifikansi kelembagaan pemerintahan lokal dalam</p>	<p>1. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam perumusan kebijakan.</p> <p>2. Efisiensi birokrasi dan efektivitas <i>governance</i> berbasis digital.</p> <p>3. Layanan publik sepenuh hati (<i>excellent service</i>).</p> <p>4. Standar pelayanan publik.</p> <p>5. Inovasi dan kualitas pelayanan publik.</p> <p>6. Harmonisasi kebijakan publik dan kearifan lokal.</p> <p>7. <i>Collaborative governance</i> dan sinergisitas <i>stakeholders</i> dalam pemerintahan.</p> <p>8. Kesejahteraan masyarakat sebagai fokus pembangunan.</p> <p>9. Penguatan kapasitas lembaga pemerintahan lokal.</p>	<p>1. Formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.</p> <p>2. Model birokrasi dan <i>e-governance</i> era revolusi industri 4.0.</p> <p>3. Model pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan sepenuh hati (<i>excellent service</i>).</p> <p>4. Integritas, loyalitas, kinerja dan profesionalisme aparatur publik dalam pelaksanaan standar pelayanan publik.</p> <p>5. Pelayanan publik berbasis digital</p> <p>6. Kebijakan publik berbasis kearifan lokal.</p> <p>7. <i>Collaborative governance (triple helix, quadruple helix)</i>.</p> <p>8. Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial-ekonomi.</p> <p>9. Model lembaga pemerintahan lokal.</p> <p>10. <i>Leadership</i> dan otonomi daerah.</p>

			<p>mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>10. Sinergisitas antara kepemimpinan pemerintah dan masyarakat.</p>	<p>10. Penguatan kapasitas <i>leadership</i> berbasis wewenang otonomi daerah.</p>	
5.	Ilmu Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksistensi demokrasi prosedural.</li> <li>2. Penguatan politik tanpa identitas.</li> <li>3. Sirkulasi elite politik berbasis politik dinasti.</li> <li>4. Rendahnya partisipasi politik pemilih dalam pelaksanaan pemilu di era bencana.</li> <li>5. Akses politik diskriminatif gender.</li> <li>6. Rendahnya akses politik etnis minoritas.</li> <li>7. Lemahnya kepemimpinan politik dalam memacu kemajuan pembangunan.</li> <li>8. Partai politik lokal dan masa depan perdamaian.</li> <li>9. Rendahnya tata kelola pemerintahan dalam proses kebijakan politik.</li> <li>10. Dissinkronisasi penanganan imigran konflik.</li> <li>11. Rendahnya kehadiran negara dalam perlindungan buruh migran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demokrasi substantif untuk menghasilkan kepemimpinan politik yang akuntabel dan akseptabel.</li> <li>2. Politik berbasis identitas ideologi.</li> <li>3. Sirkulasi elite politik berbasis kompetensi dan akuntabilitas.</li> <li>4. Optimalisasi partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilu di era bencana.</li> <li>5. Akses setara antar gender dalam politik.</li> <li>6. Kesamaan akses politik etnis minoritas dan mayoritas.</li> <li>7. Kepimpinan politik yang kuat menentukan kemajuan pembangunan.</li> <li>8. Partai lokal memperkuat eksistensi perdamaian yang berkelanjutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urgensi demokrasi substantif dalam ranah politik.</li> <li>2. Urgensi politik berbasis identitas ideologi untuk mewujudkan politik visioner.</li> <li>3. Membangun sirkulasi elite politik berbasis kompetensi dan akuntabilitas.</li> <li>4. Peningkatan partisipasi politik pemilih pada pelaksanaan pemilu di era bencana.</li> <li>5. Penguatan akses kesetaraan gender dalam politik.</li> <li>6. Penguatan kesetaraan akses politik minoritas dan mayoritas.</li> <li>7. Penguatan kepemimpinan politik dalam pembangunan.</li> <li>8. Penguatan partai lokal untuk mendukung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demokrasi substantif menuju tata kelola politik yang akuntabel dan akseptabel.</li> <li>2. Identitas ideologi dan visi politik futuristik.</li> <li>3. Politik dinasti dalam sirkulasi elite politik</li> <li>4. Partisipasi politik pada pemilihan umum di era bencana.</li> <li>5. Akses kesetaraan gender dalam politik.</li> <li>6. Partisipasi politik etnis minoritas</li> <li>7. Model kepemimpinan politik dalam pemerintahan.</li> <li>8. Eksistensi partai politik lokal era perdamaian.</li> <li>9. Kebijakan politik dalam tata kelola pemerintahan.</li> <li>10. Tata kelola penanganan imigran konflik.</li> <li>11. Kebijakan perlindungan buruh migran oleh negara.</li> <li>12. Konsep deradikalisasi dalam masyarakat.</li> </ol>

		<p>12. Rendahnya paham radikal dalam masyarakat.</p> <p>13. Rendahnya komunikasi politik antar lembaga.</p> <p>14. Disparitas relasi antara agama dan politik.</p>	<p>9. Kejelasan kebijakan politik dalam tata kelola pemerintahan.</p> <p>10. Kebijakan penanganan imigran konflik jelas dan sinkron antar lembaga pemerintahan.</p> <p>11. Kehadiran negara dalam perlindungan buruh migran jelas dan optimal.</p> <p>12. Konsep pemahaman tentang radikalisme.</p> <p>13. Harmonisasi komunikasi politik antar lembaga.</p> <p>14. Keserasian nilai-nilai agama dan politik.</p>	<p>perdamaian yang berkelanjutan.</p> <p>9. Penguatan kebijakan politik dalam tata kelola pemerintahan.</p> <p>10. Harmonisasi kebijakan penanganan imigran konflik antar lembaga pemerintahan.</p> <p>11. Optimalisasi perlindungan buruh migran oleh negara.</p> <p>12. Optimalisasi deradikalisasi dalam masyarakat.</p> <p>13. Membangun hubungan komunikasi politik yang ideal.</p> <p>14. Harmonisasi norma agama dan politik.</p>	<p>13. Hubungan komunikasi politik antar lembaga.</p> <p>14. Disparitas antara agama dan politik.</p>
6.	Antropologi	<p>1. Penyebaran paham Takfiri dan meluasnya pengaruh Khawarij.</p> <p>2. Tergerusnya pengetahuan lokal terkait sumber daya genetik pangan baik berupa tanaman dan hewan ternak.</p> <p>3. Ketimpangan Gender dalam Pola produksi dan konsumsi energi.</p> <p>4. Kurangnya pengetahuan dan tradisi budidaya</p>	<p>1. Moderasi paham keagamaan.</p> <p>2. Signifikansi pengetahuan lokal terkait sumber daya pangan.</p> <p>3. Tata kelola energi berwawasan gender dan berkelanjutan.</p> <p>4. Signifikansi pengetahuan lokal terkait tanaman obat.</p>	<p>1. Penguatan paham moderat dalam beragama.</p> <p>2. Revitalisasi pengetahuan lokal terhadap sumber daya pangan.</p> <p>3. Penguatan tata kelola energi berwawasan gender dan berkelanjutan.</p> <p>4. Revitalisasi fitofarmaka berbasis pengetahuan lokal.</p>	<p>1. Eksistensi Paham Takfiri dan Khawarij dalam Agama Islam.</p> <p>2. Kearifan lokal sumber daya pangan.</p> <p>3. Transfer dan adopsi inovasi diversifikasi energi berbasis komunitas berwawasan gender dan berkelanjutan.</p> <p>4. Fitofarmaka berbasis sumber daya lokal.</p>

		<p>tanaman obat oleh masyarakat.</p> <p>5. Marginalisasi dan kurangnya sensitivitas budaya pada perancangan sistem transportasi.</p> <p>6. Belum kuatnya sistem pengelolaan sumberdaya yang ada sebagai komponen pertahanan dan keamanan.</p> <p>7. Perubahan orientasi pembangunan dalam menempatkan laut dan sumberdaya pesisir.</p> <p>8. Kurangnya pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi sumber daya lokal (desa).</p> <p>9. Berubahnya kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan pariwisata sebagai salah satu aspek andalan.</p> <p>10. Disparitas relasi antara agama dan politik.</p> <p>11. Terganggunya pola pengelolaan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal.</p> <p>12. Degradasi peran budaya dalam pembangunan komunitas.</p>	<p>5. Tata kelola perancangan sistem transportasi yang sensitif budaya.</p> <p>6. Pengelolaan sumber daya manusia dalam komponen pertahanan dan keamanan.</p> <p>7. Signifikansi keberadaan sumberdaya laut dan pesisir.</p> <p>8. Peningkatan ekonomi berbasis sumberdaya lokal.</p> <p>9. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan tata kelola pariwisata.</p> <p>10. Keserasian nilai-nilai agama dan politik.</p> <p>11. Pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal.</p> <p>12. Eksistensi budaya dalam pembangunan komunitas.</p> <p>13. Toleransi terhadap multikulturalisme dan pluralisme dalam masyarakat.</p>	<p>5. Penguatan tata kelola perancangan sistem transportasi.</p> <p>6. Penguatan sistem pengelolaan sumber daya yang ada sebagai komponen pertahanan dan keamanan.</p> <p>7. Tata kelola sumberdaya laut dan pesisir yang efektif.</p> <p>8. Penguatan potensi lokal dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Penguatan tata kelola pariwisata berbasis komunitas.</p> <p>9. Penguatan kebijakan pembangunan nasional terkait pariwisata.</p> <p>10. harmonisasi norma agama dan politik.</p> <p>11. Tata kelola sumberdaya alam berbasis kearifan lokal.</p> <p>12. Penguatan kebudayaan dalam ruang publik.</p> <p>13. Penguatan multikulturalisme dan pluralisme dalam masyarakat.</p>	<p>5. Revitalisasi tata kelola transportasi berbasis komunitas.</p> <p>6. Revitalisasi modal sosial dan fungsi keluarga dalam penguatan komponen pertahanan dan keamanan.</p> <p>7. Revitalisasi nilai dan tradisi terkait pengelolaan sumberdaya laut dan kawasan pesisir.</p> <p>8. Revitalisasi potensi sumberdaya lokal dalam peningkatan ekonomi masyarakat.</p> <p>9. Revitalisasi nilai-nilai komunitas dalam tata kelola pariwisata.</p> <p>10. Relasi agama dan politik.</p> <p>11. Revitalisasi <i>best practice</i> pengelolaan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal.</p> <p>12. Revitalisasi kehidupan kebudayaan komunitas di tengah ekspansi perspektif pembangunan dan globalisasi.</p> <p>13. Inklusifitas terhadap keragaman budaya.</p>
--	--	---	---	--	--

		13. Dominasi etnosentrisme dan <i>stereotyping</i> dalam hubungan sosial dan budaya.			
7.	Ilmu komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola komunikasi pemerintah dalam penanganan pandemi covid 19.</li> <li>2. Signifikansi mentalitas entrepreneurship pada kaum milenial.</li> <li>3. Perspektif baru komunikasi pemberdayaan.</li> <li>4. Norma komunikasi damai dalam masyarakat pasca konflik.</li> <li>5. Komunikasi cerdas dan cerdas berkomunikasi dimasa disruption dan 4.0.</li> <li>6. Pola komunikasi politik jelang pemilihan pemimpin politik.</li> <li>7. Diskomunikasi antar aparat pemerintah lokal.</li> <li>8. Rendahnya kemampuan literasi media dan komunikasi masyarakat.</li> <li>9. Hegemoni politik ekonomi media.</li> <li>10. Digitalisasi melahirkan perubahan gaya komunikasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Signifikansi efektifitas komunikasi pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pandemi covid 19.</li> <li>2. Membangun mentalitas entrepreneurship kaum milenial.</li> <li>3. Signifikansi efektivitas komunikasi.</li> <li>4. Urgensi komunikasi damai dalam keberlanjutan perdamaian pasca konflik.</li> <li>5. Urgensi kecerdasan komunikasi pada masa disruption sosial.</li> <li>6. Signifikansi harmonisasi komunikasi politik antar elite politik.</li> <li>7. Urgensi komunikasi efektif antar lini pemerintahan lokal.</li> <li>8. Penguatan literasi media dan komunikasi.</li> <li>9. Hegemoni politik ekonomi media.</li> <li>10. Gaya komunikasi masyarakat, era digital.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi efektif pemerintah dan publik dalam penanganan pandemi covid 19.</li> <li>2. Penguatan entrepreneurship dalam meningkatkan kesejahteraan.</li> <li>3. Penguatan kemampuan komunikasi pemberdayaan dalam masyarakat.</li> <li>4. Penguatan komunikasi damai pada masyarakat pasca konflik.</li> <li>5. Penguatan kapasitas kecerdasan komunikasi.</li> <li>6. Komunikasi politik damai para elite politik jelang pemilihan pemimpin politik.</li> <li>7. Integrasi komunikasi antar aparat pemerintahan lokal.</li> <li>8. Literasi media, inokulasi media.</li> <li>9. Dehegemonisasi politik ekonomi media, optimalisasi media watch.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi komunikasi efektif pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pandemi covid 19.</li> <li>2. Mentalitas entrepreneurship dan strategi meraih kesejahteraan.</li> <li>3. Komunikasi pemberdayaan dalam penguatan modal sosial masyarakat.</li> <li>4. Model komunikasi damai pada masyarakat pasca konflik.</li> <li>5. Pola komunikasi cerdas dan cerdas berkomunikasi dimasa disruption sosial.</li> <li>6. Model komunikasi politik elite politik pada pemilihan pemimpin politik.</li> <li>7. Model komunikasi efektif pemerintahan lokal.</li> <li>8. Literasi media &amp; komunikasi dalam masyarakat.</li> <li>9. Ekonomi politik media era digital</li> <li>10. Perubahan gaya komunikasi masyarakat era digital.</li> <li>11. Game online dan masyarakat digital.</li> <li>12. Publik relation dalam dunia kerja.</li> <li>13. Riset penulisan naskah dan produksi film.</li> <li>14. Model gampong literasi dan digital.</li> </ol>

		<p>11. <i>Game holic</i> pada masyarakat digital.</p> <p>12. Implementasi publik relation dalam dunia kerja pemerintah maupun swasta.</p> <p>13. Kapasitas penulisan naskah dan produksi film.</p> <p>14. Gampong literasi dan gampong digital.</p> <p>15. Rendahnya promosi dan pemasaran potensi pariwisata.</p> <p>16. Disrupsi komunikasi pada ranah pendidikan.</p> <p>17. Rendahnya pemahaman dan kemampuan komunikasi diranah kesehatan.</p> <p>18. Miskomunikasi antar budaya.</p>	<p>11. Kesadaran subjektif dalam memilih game pada masyarakat digital.</p> <p>12. Publik relation, dunia kerja.</p> <p>13. Kemampuan menulis dan memproduksi film.</p> <p>14. Signifikansi eksistensi gampong literasi dan digital.</p> <p>15. Urgensi optimalisasi promosi dan pemasaran potensi pariwisata.</p> <p>16. Komunikasi efektif pada ranah pembelajaran di era disrupsi.</p> <p>17. Komunikasi efektif diranah kesehatan.</p> <p>18. Komunikasi damai lintas budaya.</p>	<p>10. Pemahaman komunikasi dengan baik pada masyarakat.</p> <p>11. Penguatan kesadaran subjektif masyarakat dalam memilih game.</p> <p>12. Pemahaman fungsi dan tujuan pr dalam dunia kerja.</p> <p>13. Penguatan kemampuan penulisan naskah dan produksi film.</p> <p>14. Penguatan eksistensi gampong literasi dan digital di era revolusi 4.0.</p> <p>15. Integrasi promosi dan pemasaran potensi pariwisata.</p> <p>16. Penguatan model komunikasi pendidikan berbasis aplikasi digital.</p> <p>17. Penguatan model komunikasi didunia kesehatan.</p> <p>18. Penguatan komunikasi damai lintas budaya.</p>	<p>15. Strategi promosi dan pemasaran potensi pariwisata.</p> <p>16. Model komunikasi efektif pada ranah pendidikan di era disrupsi.</p> <p>17. Model komunikasi diranah kesehatan.</p> <p>18. Model komunikasi lintas budaya.</p>
8.	Administrasi Bisnis	<p>1. Revolusi industri 4.0 dan <i>e-leadership</i>.</p> <p>2. Signifikansi pemetaan sebelum keputusan memulai bisnis.</p> <p>3. Dinamika bisnis berbasis aplikasi.</p>	<p>1. Tuntutan perubahan gaya kepemimpinan pada era digital.</p> <p>2. Model bisnis berpengaruh terhadap jalannya suatu usaha.</p>	<p>1. Mengikuti perkembangan gaya kepemimpinan terkini.</p> <p>2. Menentukan model business yang paling sesuai dengan usaha.</p>	<p>1. Gaya kepemimpinan dalam era industri 4.0.</p> <p>2. <i>Business</i> model canvas dan keputusan memulai usaha.</p> <p>3. Model usaha berbasis aplikasi digital.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemasaran berbasis digital.</li> <li>5. Pembayaran berbasis digital.</li> <li>6. Pengembangan UMKM berbasis potensi lokal.</li> <li>7. Dinamika peluang dan ancaman bisnis.</li> <li>8. Manajemen sumber daya manusia dalam dunia bisnis.</li> <li>9. Dinamika kepuasan kerja karyawan.</li> <li>10. Eksistensi bisnis berbasis syariah.</li> <li>11. Dinamika sistem pengelolaan perusahaan.</li> <li>12. Adaptasi pengetahuan terhadap perubahan bisnis.</li> <li>13. Dinamika investasi dan pasar modal.</li> <li>14. Peluang dan tantangan pemasaran produk <i>home</i> industri.</li> <li>15. Pola-pola pelayanan terhadap pelanggan.</li> <li>16. Dinamika keputusan konsumen dalam pembelian produk.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. <i>Business Start Up</i> meningkat pesat pada era digital.</li> <li>4. Perubahan pola pemasaran dari konvensional menjadi digital marketing.</li> <li>5. Perubahan <i>mode</i> pembayaran dari konvensional menjadi berbasis elektronik.</li> <li>6. Pentingnya peran umkm dalam menopang pertumbuhan ekonomi.</li> <li>7. Riset pasar untuk meminimalisasi tingkat kegagalan usaha.</li> <li>8. Signifikansi efektivitas manajemen sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan bisnis.</li> <li>9. Kepuasan kerja untuk menghindari fenomena turnover karyawan.</li> <li>10. Meningkatnya peminat layanan business berbasis syariah.</li> <li>11. Perubahan tata kelola perusahaan pada industri 4.0.</li> <li>12. Pentingnya pengelolaan pengetahuan dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meraih peluang bisnis berbasis <i>Start Up</i>.</li> <li>4. Mampu memanfaatkan digital dalam melakukan kegiatan pemasaran.</li> <li>5. Memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembayaran berbasis <i>e-marketing</i>.</li> <li>6. Menumbuhkan minat dan potensi semua lapisan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi berbasis UMKM.</li> <li>7. Melakukan riset pasar sebelum mengeluarkan produk/jasa.</li> <li>8. Penguatan kualitas sumber daya manusia dalam dunia bisnis.</li> <li>9. Mengoptimalkan kepuasan kerja karyawan untuk menjamin keberlangsungan bisnis.</li> <li>10. Menjalankan bisnis sesuai prinsip-prinsip syariah.</li> <li>11. Adaptasi pola pengelolaan perusahaan pada era digital.</li> <li>12. Meminimalkan resiko dalam investasi dan pasar modal.</li> <li>13. Ketepatan keputusan dalam melakukan investasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Digital marketing dari <i>business to business</i> dan <i>business to consumer</i></li> <li>5. Model pembayaran berbasis <i>e-payment</i>, dan <i>e-money</i>.</li> <li>6. Mengembang umkm berbasis potensi lokal.</li> <li>7. Strategi pemasaran yang berdaya saing berbasis produk lokal.</li> <li>8. Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi bisnis.</li> <li>9. Upah kerja, turnover karyawan, loyalitas dan kepuasan kerja.</li> <li>10. Pengelolaan berbasis prinsip-prinsip syariah.</li> <li>11. Tata kelola perusahaan berbasis <i>good corporate governance</i> pada era digital.</li> <li>12. Adaptasi pengetahuan pelaku bisnis dalam menjaga keberlanjutan.</li> <li>13. Peluang dan strategi investasi di pasar modal.</li> <li>14. Strategi pemasaran produk berbasis <i>home</i> industri.</li> <li>15. Dampak kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan.</li> <li>16. Pengaruh harga, kualitas produk, lokasi dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian konsumen.</li> </ol>
--	--	--	--	--	--

			<p>menjaga kestabilan proses bisnis perusahaan.</p> <p>13. Peluang dan tantangan dalam investasi dan pasar modal.</p> <p>14. Strategi pemasaran produk home industri.</p> <p>15. Pelayanan terhadap pelanggan yang berkualitas.</p> <p>16. Gaya hidup konsumen dan keputusan terhadap pembelian produk.</p>	<p>14. Penguatan pengetahuan tentang strategi pemasaran home industri.</p> <p>15. Strategi pelayanan yang memuaskan pelanggan.</p> <p>16. Strategi efektif dalam penjualan produk dan adaptasi terhadap dinamika keputusan konsumen dalam pembelian produk.</p>	
--	--	--	---	---	--

## BAB IV

### SASARAN PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

#### 4.1 Sasaran Program Penelitian

Tujuan dan sasaran, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6  
Tujuan dan Sasaran

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program Peningkatan Mutu pendidikan dan pembelajaran yang unggul berstandar internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.		
	Terwujudnya Mutu Pendidikan dan Pembelajaran yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Persentasi Jumlah Dosen S3 dan Guru Besar</li><li>b. Persentasi Keselarasan kurikulum sesuai konsep merdeka belajar</li><li>c. Persentasi Keselarasan kurikulum sesuai Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Fisip.</li><li>d. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industry</li><li>e. Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar</li><li>f. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Program Studi</li><li>g. Persentase Peningkatan Sistem Informasi Akademik Berbasis 4.0</li><li>h. Persentase Peningkatan Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan</li><li>i. Persentase mahasiswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi</li><li>j. Persentase mahasiswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum</li><li>k. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan</li></ul>
2. Program meningkatnya kuantitas, mutu, dan pengembangan riset unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;		

	Mewujudkan Peningkatan kuantitas mutu dan pengembangan riset	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Pengembangan dan Publikasi Riset.</li> <li>b. Persentasi Riset Berbasis Potensi Lokal.</li> <li>c. Persentasi Kualitas Riset Berbasis Potensi Lokal</li> <li>d. Persentase Kolaborasi Riset di era TIK</li> <li>e. Persentase Peningkatan HAKI dan Paten</li> </ul>
3. Program meningkatnya karya pengabdian kepada masyarakat yang bersifat transformatif, berkelanjutan, dan unggul di tingkat internasional dalam bidang keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal;		
	Mewujudkan karya pengabdian yang bersifat transformatif, berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Pengembangan dan Publikasi Hasil Pengabdian</li> <li>b. Persentasi Pengabdian Berbasis Potensi Lokal</li> <li>c. Persentasi Kualitas Pengabdian Berbasis Potensi Lokal</li> <li>d. Persentasi Kerjasama kemitraan dalam Pengabdian</li> <li>e. Persentasi Keterlibatan Mahasiswa dalam Pengabdian</li> <li>f. Persentasi Kolaborasi Pengabdian</li> </ul>
4. Program meningkatnya sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi unggul dalam bidang keilmuan sosial dan politik dan pelayanan administrasi berbasis potensi lokal dan berstandar internasional;		
	Terwujudnya sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter</li> <li>b. Persentasi Peningkatan Dosen S3 dan Guru Besar</li> <li>c. Persentasi Peningkatan Sertifikasi Dosen</li> <li>d. Persentasi Peningkatan Publikasi</li> <li>e. Persentasi Peningkatan Diklat Tendik</li> </ul>
5. Program terwujudnya kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang unggul, efektif, efisien, dan berintegritas;		
	Mewujudkan kinerja yang unggul, efektif, efisien dan berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Opini laporan keuangan</li> <li>b. Indeks kepuasan pemangku kepentingan FISIP</li> <li>c. Indeks Reformasi Birokrasi</li> </ul>
6. Program meningkatnya hubungan sinergis di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan keilmuan sosial dan politik berbasis potensi lokal.		

	Mewujudkan sinergitas lokal, nasional dan internasional	a. Persentase Kerja sama lokal, Nasional dan Internasional
--	---	--

#### 4.2 Program Strategis dan Topik-Topik Riset

Topik strategis penelitian ini didasarkan kepada Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045, Peraturan Menteri 20 Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan Tahun 2020-2024, Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024 dan masukan dari setiap Jurusan dan Program Studi.

Topik fokus ini juga disusun dengan memperhatikan capaian hasil penelitian Rencana Induk Penelitian FISIPOL Tahun 2016-2019. Adapun topik-topik riset unggulan yang berpotensi dan diharapkan dapat terlaksana pada Tahun 2020 – 2024 dikelompokkan ke dalam delapan fokus riset, yaitu:

1. Modal sosial dan kearifan lokal;
2. Konflik dan perdamaian;
3. Model birokrasi dan *e-governance* era revolusi industri 4.0;
4. Kebijakan publik berbasis kearifan lokal;
5. Eksistensi partai politik lokal era perdamaian;
6. Inklusifitas terhadap keragaman budaya;
7. Model komunikasi lintas budaya;
8. Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal;

## BAB V

### PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENELITIAN FISIPOL

Sangat disadari bahwa pelaksanaan Rencana Induk Penelitian Universitas Malikussaleh sangat bergantung pada berbagai sumber dana institusi. Untuk itu dan sembari melakukan upaya penguatan institusi dan penataan sistem penjaminan mutu penelitian maka Universitas Malikussaleh sesuai dengan rencana kerjanya akan mengupayakan berbagai sumber pendanaan dari pihak swasta, pemerintah maupun kerjasama luar negeri, selain juga pendanaan yang berasal dari PNBPN Unimal, serta dari pihak lainnya.

Dana penelitian yang berasal dari Kemenristik/BRIN dan PNBPN Unimal terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Jumlah dana penelitian Tahun 2015 berjumlah Rp. 2.873.000.000. Meningkat mejadi Rp. 5.541.741.500 pada Tahun 2019. Peningkatan ini terjadi karena jumlah judul penelitian yang semakin meningkat dari Tahun ke Tahun. Judul penelitian Tahun 2015 berjumlah 52 judul, meningkat menjadi 140 judul pada Tahun 2019. Estimasi Jumlah dan Dana Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024 ditampilkan pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16

#### Alokasi Dana Penelitian dan Pengabdian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<b>Program</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Penelitian	1.016.650.000	1.344.000.000	1.255.000.000	1.450.000.000	1.675.000.000
Penelitian ADB	-	-	162.000.000	185.000.000	200.000.000
Pengabdian	244.000.000	228.000.000	240.000.000	250.000.000	260.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.260.650.000</b>	<b>1.572.000.000</b>	<b>1.657.000.000</b>	<b>1.885.000.000</b>	<b>2.135.000.000</b>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Induk Penelitian ini disusun dengan melibatkan partisipasi unit kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh serta jurusan dan program studi. Isi RIP ini mencakup delapan fokus penelitian yaitu Modal sosial dan kearifan lokal; Konflik dan perdamaian; Model birokrasi dan *e-governance* era revolusi industri 4.0; Kebijakan publik berbasis kearifan lokal; Eksistensi partai politik lokal era perdamaian; Inklusifitas terhadap keragaman budaya; Model komunikasi lintas budaya; Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal.

Topik riset ini disusun untuk mencapai visi, misi, dan IKU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh ke depan. RIP ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh secara umum menuju perguruan tinggi mandiri sekaligus menuju *research university*. Untuk itu, pada tahapan pelaksanaan ataupun implementasi RIP ini pada dasarnya menuntut peranan besar serta kesiapan dari keseluruhan unit kerja di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, baik dari segi organisasi maupun sumber daya manusia. Keberlanjutan terhadap pelaksanaan RIP akan menjadi tanggung jawab Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan dan Program Studi secara keseluruhan. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Rencana Induk Penelitian yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan naskah ini tepat waktu.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada: 1. Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Malikussaleh atas dukungan dalam penyusunan dan pengesahan RIP Universitas Malikussaleh, 2. Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, atas dukungannya sehingga dapat dilaksanakan Rapat Senat untuk menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024. 3. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang telah memberikan saran dan masukan bagi Penyusunan RIP. RIP masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Namun, harapan besar adalah RIP ini dapat menguatkan kapasitas riset sivitas akademika

sehingga visi misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh di bidang penelitian dapat tercapai dengan baik.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**  
**NOMOR : 370/UN45.2/HK.04/2020**  
**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**  
**TAHUN 2020-2024**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan pedoman bagi sivitas akademika pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Induk Penelitian;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018;
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 628/UN45/KP/2020
- Memperhatikan** : Rencana Induk Penelitian Universitas Malikussaleh dan kebijakan penelitian Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2020-2024.**
- KESATU** : Menetapkan Saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tahun 2020-2024.

- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Induk Penelitian dan Pegabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh tahun 2020-2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bukit Indah  
pada tanggal 14 Mei 2020

DEKAN,

**Dt. M. NAZARUDDIN, S.S., M.Si**  
NIP. 197305152002121001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Malikussaleh;
2. Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Malikussaleh;
3. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Malikussaleh;
4. Kepala BAAKPSI Universitas Malikussaleh;
5. Kepala BAUK Universitas Malikussaleh;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
NOMOR : 370/UN45.2/HK.04/2020  
TENTANG PENETAPAN PENYUSUN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN  
PEGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

---

- I. Pengarah : Dr. M. Nazaruddin, M.Si. (Dekan)
- II. Penanggung jawab : 1. Dr. Nirzalin, M.Si (Wakil Dekan I)  
2. Anismar, M.Si (Wakil Dekan II)  
3. Subhani, S.Sos., M.Si (Wakil Dekan III)
- III. Ketua Pelaksana : Bobby Rahman, S.Sos., M.Si  
Anggota : 1. Nur Hafni, M.P.A  
2. Abdullah Akhyar Nasution, S.Sos., M.Si  
3. Ade Ikhsan Kamil, S.Sd.I., MA.  
4. Cut Riska Al Usrah, S.Pd., MA  
5. Harinawati, S.Sos., M.A  
6. Teuku Muzaffarsyah. S.IP., M.A.P  
7. Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP  
8. Sufi, S.Sos., M.S.P  
9. Richa Meliza, S.Sos., M.Ant  
10. Mukhlis, S.Sos  
11. Fakhriah, SP  
12. Wardiana, SE  
13. M. Fathi, S.Kom

Bukit Indah, 14 Mei 2020

Dekan



**Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si.**  
NIP. 197305152002121001